

Efektifitas Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember (*The Effective Implementation Of National Empowerment For Independent Tourism Community Program In Kemuning Lor Village Arjasa Sub District, Jember District*)

Moch Arie Ardiansyah, Sutomo, M. Hadi Makmur
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: sutomo.fisip@unej.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektifitas Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata menurut perspektif model George Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan format penelitian deskriptif. Data yang diperoleh, kemudian di analisis secara interaktif dengan menggunakan model Miles Huberman. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor komunikasi dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Pariwisata ini sudah berjalan cukup baik. Pada faktor sumber-sumber kurang efektif dimana dari unsur staf baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pengelola program mengalami keterbatasan pelaksana yang mana tidak diimbangi dengan penerima manfaat. Wewenang terbatas dan fasilitas masih minim Pada faktor kecenderungan dukungan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Pariwisata ini cukup baik. Dan terakhir, faktor struktur birokrasi pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata sudah sesuai yang diharapkan. Prosedur kerja yang digunakan pelaksana juga sudah mencerminkan kesamaan apa yang diterapkan di Peraturan mengenai program PNPM Mandiri Pariwisata.

Kata Kunci: Efektifitas, PNPM, Desa Wisata.

Abstract

This research aim to explain The Effective Implementation Of National Empowerment For Independent Tourism Community Program In Kemuning Lor Village Arjasa Sub District, Jember District according to is in perspective of George Edward III model. This research use approach qualitative with descriptive research format. The data in analysis interaktif by using model of Miles Huberman. Pursuant to result of research indicate that, communications factor in executing program of PNPM Self-Supporting of this Tourism have walked is good enough. At factor of is source of less effective where from staff element either from on duty culture and tourism and also organizer of natural program of limitation of which executor do not make balance to with receiver of benefit. Limited authority and minim still facility. At factor tendency of society support in program of PNPM Self-Supporting of Tourism is good enough. And is last, bureaucracy structure factor at execution of program of PNPM Self-Supporting of Tourism have as expected. used by working procedure is executor also have expressed equality what applied in Regulation concerning program of PNPM Self Supporting of Tourism.

Keywords: Effective, PNPM, Countryside of Wisata

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran-serta masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan sosial atau struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendalikkan dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat manusiawi (Slamet, 1981:17). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pada kepatuhan mandat Nasional dan

Internasional menjadi dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata merupakan salah satu program pemerintah Indonesia sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang memanfaatkan potensi di perdesaan dengan jalan memberdayakan masyarakat lokal dan berusaha mengangkat nilai kearifan lokal masyarakat di dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di desa. Sumber kewenangan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata untuk Desa Wisata yaitu Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata merupakan bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang bergabung sejak tahun 2008 dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang lebih bersifat sektoral, dalam artian sudah terfokus pada sektor tertentu.

Jawa Timur merupakan propinsi yang besar dengan jumlah kecamatan 38 Kabupaten atau Kota dan memiliki 8477 desa dan kelurahan yang masih banyak untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata sesuai ciri atau karakteristik potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Di Kabupaten Jember, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata pertama kali ada sejak tahun 2011 dan sebagai salah satu desa penerima yaitu Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa yang mana melihat potensi yang dimiliki Desa Kemuning lor telah dianggap cukup layak sebagai pengembangan Desa Wisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata mengalokasikan bantuan dana untuk Desa Wisata Kemuning Lor tahun 2011 sebesar Rp. 65 juta dan tahun 2012 sebesar Rp. 100 juta, serta juga berasal dari dana swadaya masyarakat. Dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Kemuning Lor. Dana bantuan desa wisata tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan agrowisata dan sapi perah, pengembangan kesenian, kerajinan, cinderamata, keamanan, transportasi, homestay, dan kuliner. Pemanfaatan bantuan desa wisata tidak diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan seperti infrastruktur dan dana simpan pinjam seperti yang ada di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan.

Berdasarkan keterangan informan, pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata dijumpai beberapa permasalahan yaitu dari faktor potensi yang dimiliki Desa Kemuning Lor sangat memadai, namun masyarakat belum bisa memanfaatkan secara baik yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kemuning Lor. Faktor sumber daya manusia yang rendah juga menjadi masalah yang menghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pengembangan desa wisata melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata masih kurang karena minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan. Oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata sangat diperlukan sebagai suatu program pengembangan Desa Wisata agar masyarakat Desa Kemuning Lor semakin tertarik untuk menjadikan desanya menjadi Desa Wisata yang tentunya akan memberikan manfaat yang besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menumbuhkan perekonomian masyarakat, serta lebih mengembangkan aktifitas kepariwisataan yang ada di Desa Kemuning Lor.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mencari jawaban melalui serangkaian penelitian analisis kebijakan publik. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan terhadap implementasi suatu kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata. Implementasi kebijakan pada prinsipnya agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam suatu kebijakan yang baik, implementasi memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan suatu kebijakan. Namun sayangnya, banyak penelitian menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi antara 10-20% saja (Riant Nugroho, 2008:432). Implementasi adalah alat administrasi di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:102). Implementasi kebijakan merupakan serangkaian proses yang penting tanpa adanya implementasi suatu kebijakan akan menjadi sia-sia. Pada bagian lain, Winarno (2005:163) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan, tanpa adanya implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan meneliti proses pelaksanaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPariwisata dengan menjelaskan berdasarkan analisa model George Edward III. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul **"Efektifitas Implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Model George Edward III"**.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah mengenai Efektifitas Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata untuk desa wisata di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember menurut analisa George Edward III. Lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, catatan, laporan, makalah, jurnal, karya tulis ilmiah. Pada penelitian ini, metode pengumpulan yang digunakan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah Tim Teknis PNPM Mandiri Pariwisata Kabupaten Jember, Ketua Pelaksana, fasilitatpr, sekretaris, dan 9 orang penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil Penelitian

Pada variabel komunikasi, faktor transmisi pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata di Desa Kemuning Lor komunikator adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember yang menetapkan Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 06/KEP/D.PDP/IV/2011 mempunyai tugas yakni memberikan sosialisasi tentang pengetahuan untuk sadar wisata kepada komunikan terlebih dahulu yakni 20 orang masyarakat terdiri dari 6 aparat desa, 4 tokoh masyarakat, 10 masyarakat dan informasi mengenai program inti yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata kepada komunikan yaitu masyarakat Desa Kemuning Lor yang terdiri dari 7 perangkat desa, 10 tokoh masyarakat, 20 ketua RT atau RW, 2 anggota BPD, 2 kepala dusun rayap dan krajan, 3 Tim Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata, serta 30 masyarakat yang terdiri dari 8 orang dari dusun darungan, 9 orang dari dusun rayap, 6 orang dari dusun kopang kebun, serta 7 orang dari dusun krajan. Lokasi sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Desa Kemuning Lor. Alat yang digunakan dalam penyampaian informasi melalui speaker, sedangkan penyajian informasi disampaikan secara langsung dengan tatap muka kepada masyarakat desa kemuning lor. Sosialisasi dilaksanakan pada awal bulan 10 Januari 2011 mengenai pemahaman sadar wisata, dan akhir bulan 24 September 2011 mengenai tujuan dan manfaat program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata, serta pelaksanaan program beserta musyawarah kegiatan program PNPM Mandiri Pariwisata yang akan dilakukan ke depan.

Faktor kejelasan yang disampaikan kepada masyarakat Desa Kemuning Lor khususnya sasaran penerima mengenai informasi cukup jelas. Meskipun beberapa masyarakat Desa Kemuning Lor khususnya penerima program tidak semua memahami informasi yang telah disampaikan mengenai PNPM Mandiri Pariwisata. Dalam hal ini, semua masyarakat miskin penerima program juga tidak sepenuhnya memahami informasi PNPM Pariwisata yang telah disampaikan. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta kesadaran akan pentingnya sadar wisata juga mempengaruhi sosialisasi program PNPM Pariwisata kurang berjalan secara optimal. Selain itu, karakteristik masyarakat yang tradisional dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah juga membuat pemahaman informasi program tidak dapat dipahami dengan baik. Untuk itu, perlu sosialisasi secara personal yang terus menerus seperti saat ada rapat koordinasi yang waktunya seminggu sekali atau dua kali untuk memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat Kemuning Lor tentang tujuan dan manfaat program PNPM Mandiri Pariwisata serta dilakukan untuk membahas kegiatan di setiap kelompoknya.

Faktor konsistensi terlihat bahwa pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata ini dikatakan cukup konsisten. Hal ini dibuktikan sesuai wawancara diatas menyatakan bahwa alur pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan

Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata sudah dapat dilakukan sesuai aturan. Di samping itu juga kegiatan yang direncanakan awal oleh masyarakat Desa Wisata Kemuning Lor juga dapat dilaksanakan tanpa ada perubahan prioritas kegiatan saat di lapangan. Di lain sisi, dari beberapa prioritas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wisata Kemuning Lor, ada satu kegiatan yang masih belum dapat dijalankan yaitu pada kelompok kerja homestay. Hal ini dikarenakan masyarakat masih kesulitan menemukan rumah singgah yang memiliki karakteristik Desa Kemuning Lor mana nantinya akan dikembangkan dan hasilnya akan ditujukan untuk wisatawan yang berkunjung sebagai rumah singgah mereka selama berkunjung di Desa Wisata Kemuning Lor, faktor SDM dan dana juga menjadi kendala dalam pengembangan di bidang homestay. Selanjutnya, dari sisi pemanfaatan bantuan desa wisata yang diterima masyarakat sudah dapat dimanfaatkan sesuai karakter potensi desa wisata kemuning lor.

Pada sumber-sumber, faktor staf mengamati. sesuai hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata ini bahwa untuk jumlah pelaksana terbatas baik secara kuantitas dan kualitas. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Tim Teknis menyatakan kekurangan sumber daya manusia. Tim Teknis ini hanya 1 orang dan Tim Pelaksana Desa sebagai pengelola program ada 6 orang yang ditetapkan oleh masyarakat Desa Kemuning Lor dibandingkan dengan penerima mencapai 175 orang. faktor pendidikan pelaksana desa yang hanya rata-rata berpendidikan SMA memungkinkan mempengaruhi kemampuan mereka menjalankan program. Dengan melihat pendidikan pelaksana yang masih tergolong minim, secara kualitas pelaksana desa juga masih rendah. Pada pemahaman pelaksanaan program, pelaksana desa hanya mendapatkan pelatihan yang sangat terbatas.

Faktor wewenang menyatakan bahwa pelaksana Desa Wisata Kemuning Lor tersebut wewenangnya terbatas. Mereka sebatas mengelola dana yang telah diberikan dan melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan prioritas kegiatan yang dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki. Pelaksana desa hanya memiliki wewenang mengusulkan, merencanakan kegiatan dan memutuskan usulan kegiatan bersama dengan masyarakat penerima sesuai musyawarah yang telah dilakukan dengan para pemangku kepentingan Desa Kemuning Lor. Rencana usulan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut akan dijadikan prioritas kegiatan yang akan dijalankan bersama dengan kelompok kerja penerima program berdasarkan aturan, serta menyampaikan hasil kinerja kegiatan dari 8 kelompok kerja yang sudah terealisasi.

Faktor informasi dapat diketahui bahwa untuk tugas dan prosedur pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata sudah cukup jelas dipahami oleh pelaksana. Dan untuk ketaatan pelaksana dalam melaksanakan program juga sudah cukup baik yang dapat dilihat pada informasi laporan mengenai pemanfaatan bantuan dana dan kegiatannya sehingga dengan ketaatan pelaksana ini membuat kinerja pelaksana semakin baik dan meminimalisir penyimpangan

dalam pemanfaatan bantuan desa wisata pada program PNPM Mandiri Pariwisata tersebut. Dan, faktor fasilitas terlihat bahwa fasilitas secara fisik sama sekali tidak diberikan dalam menunjang kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, Akan tetapi secara non fisik tidak terdapat masalah, dana tersebut telah cukup menunjang untuk kegiatan masyarakat di setiap kelompok sehingga memungkinkan segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Namun di sisi lain, pelaksanaan program masih terkendala dengan sumber daya manusia yang rendah sehingga butuh peningkatan kualitas SDM lebih lanjut untuk dapat memberikan hasil program yang lebih baik ke depan.

Pada variabel kecenderungan terlihat bahwa pelaksana sudah cukup baik dalam merespon program PNPM Mandiri Pariwisata yang telah diberikan kepada mereka. Semangat pada setiap kelompok mulai tinggi dan perlahan mereka juga menyadari pentingnya potensi wisata desanya untuk dikembangkan menjadi lebih maju. Hanya saja dari segi sumber daya manusia masyarakat perlu dikembangkan sehingga mereka dapat dengan cepat memahami tugasnya dengan baik tanpa ada kendala. Kecenderungan pelaksana dalam melakukan tugasnya sudah berjalan dengan baik. Dengan harapan mereka dapat dengan cepat mewujudkan desanya menjadi desa wisata dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kemuning Lor.

Terakhir, pada variabel struktur birokrasi terlihat bahwa untuk prosedur ukuran kerja hanya dalam bentuk Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 terkait PNPM Mandiri Pariwisata melalui desa wisata dan juga ada Pedoman Teknis Operasional Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2010. Dalam pelaksanaan di lapangan juga sudah mengikuti petunjuk teknis yang sama dengan peraturan atau pedoman umum pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata tersebut. Hanya saja masyarakat perlu ditingkatkan kembali pemahamannya secara umum pada penyelenggaraan program PNPM Mandiri Pariwisata ini. Untuk tataran fragmentasi implementasi program PNPM Mandiri Pariwisata ini cukup baik. Berdasarkan observasi, juga diketahui dalam melakukan kegiatan di setiap kelompok sudah disesuaikan dan mereka juga tidak saling lempar tanggung jawab bahkan di salah satu kegiatan seperti kesenian, anggotanya sudah saling membantu dan saling berbagi ilmu dalam kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pembagian tugasnya juga dapat dikatakan sudah baik.

Pembahasan

Pada faktor komunikasi ini, peneliti menilai tingkat komunikasi dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Pariwisata ini sudah berjalan cukup baik. Komunikasi yang diterima tidak hanya pada tataran pelaksana saja, namun masyarakat penerima juga memahami apa yang dilakukannya. Dalam transmisi program PNPM Mandiri Pariwisata ini pada ikhwalnya sudah dijalankan dengan baik kepada penerima program. Komunikator adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember dengan memberikan sosialisasi sadar wisata terlebih dahulu dan informasi mengenai program inti yaitu PNPM Mandiri

Pariwisata kepada komunikan yaitu masyarakat Desa Kemuning Lor. Komunikasi pelaksanaan program ini dapat dikatakan sudah jelas diimbangi dengan apa yang diterima oleh masyarakat penerima dan pelaksana menjalankan program tersebut sehingga program ini dapat di respon secara positif dan baik oleh masyarakat Desa Kemuning Lor untuk memberikan kemajuan bagi desa wisata kemuning lor umumnya dan bagi kesejahteraan masyarakat Kemuning Lor khususnya dan juga telah mencerminkan kesesuaian antara peraturan dengan kenyataan di lapangan pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Kemuning Lor.

Pada tataran faktor sumber-sumber kurang efektif. Dari unsur staf menjelaskan bahwa ada keterbatasan pelaksana yang mana tidak diimbangi dengan penerima manfaat sehingga terkadang menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, wewenang pelaksana desa juga terbatas didukung dengan informasi yang mana tidak semua masyarakat penerima memahami pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata meskipun sudah dijelaskan dalam peraturan sehingga membutuhkan pemahaman kepada penerima lebih lanjut melalui rapat-rapat koordinasi dan musrenbangdes. Terakhir, dari sisi fasilitas, peneliti menilai masih minim dikarenakan fasilitas yang diberikan hanya sebatas dana yang bersumber dari program PNPM Mandiri Pariwisata yang mana dana tersebut terbatas dan tidak diimbangi fasilitas secara fisik sehingga terkadang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan penelitian, faktor kecenderungan dukungan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Pariwisata ini cukup baik. Hal tersebut diketahui pada saat peneliti juga mengamati beberapa kegiatan, mereka sudah mulai mampu memahami apa yang harus dilakukan meskipun di luar itu ada juga beberapa anggota yang kurang mengerti. Selain itu, juga sesuai pemantauan dari fasilitator juga menandakan kegiatan dan dukungan masyarakat mensukseskan program desa wisata berjalan dengan lancar dan sangat diberikan respon yang positif oleh masyarakat Desa Kemuning Lor. Kemudian juga, sikap dukungan dan komitmen masyarakat ini diketahui adanya respon yang cepat apabila dalam melaksanakan kegiatan mengalami kendala, mereka langsung melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan, Fasilitator, dan pihak Tim Teknis Kabupaten Jember serta kesediaan pelaksana baik waktu dan tenaga mereka yang ditujukan untuk memberikan kesuksesan terhadap program yang dilakukan di Desa Wisata Kemuning Lor. Peneliti menilai bahwa sikap mereka dalam memecahkan kendala program dengan cepat sebagai bukti apabila mereka memberi dukungan dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan Desa Kemuning Lor sebagai desa wisata pertama di Kabupaten Jember. Hal tersebut memberikan catatan bahwa upaya masyarakat ini adalah tanda keseriusan pelaksana dan penerima manfaat untuk merespon program agar dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dan terakhir, faktor struktur birokrasi pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata sudah sesuai yang diharapkan. Prosedur kerja yang digunakan pelaksana juga sudah mencerminkan kesamaan apa yang diterapkan di Peraturan mengenai program PNPM Mandiri Pariwisata. Pada pelaksanaan program PNPM Mandiri

Pariwisata ini, untuk standar kerja pelaksanaan program hanya dalam bentuk Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata dan juga untuk di Desa Kemuning Lor menggunakan Petunjuk Teknis Operasional atau PTO Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2010. Kesesuaian mereka melaksanakan kegiatan telah teratur secara jelas pada peraturan dan petunjuk teknis operasional tersebut. Kedua pedoman diatas digunakan sebagai acuan pelaksana maupun penerima dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Pariwisata ini yang mana sudah terjabar jelas mengenai persiapan program hingga evaluasi terhadap program PNPM Mandiri Pariwisata Selain itu, tanggungjawab pada pelaksanaan program tersebut sudah di sesuaikan masing-masing. Pada tataran Tim Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember mempunyai tugas untuk membantu secara teknis dan memantau kinerja pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata yang ada di Desa Wisata Kemuning Lor. Kemudian untuk pelaksana desa memiliki tugas secara penuh melaksanakan program hingga melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penanggung jawab program PNPM Mandiri Pariwisata di Kabupaten Jember. Tugas dan fungsi pelaksana tersebut juga sudah diatur jelas di dalam peraturan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata dengan menggunakan pendekatan model Edward III sebagai berikut.

Faktor komunikasi pada program PNPM Mandiri Pariwisata ini sudah terjalin dengan baik mencakup setiap elemen baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, pelaksana desa baik pengelola dan masyarakat sekitar sebagai sasaran penerima program yang mengetahui isi dengan jelas tentang tujuan dan manfaat dari program PNPM Mandiri Pariwisata, serta terdapat kesesuaian pedoman dengan kenyataan di lapangan. Faktor sumber-sumber kurang efektif dimana dari unsur staf mengalami keterbatasan pelaksana yang mana tidak diimbangi dengan penerima manfaat yang relatif banyak. Wewenang pelaksana desa juga terbatas didukung dengan informasi yang tidak semua masyarakat penerima memahami program PNPM Mandiri Pariwisata. Selain itu, fasilitas untuk program ini masih minim dikarenakan fasilitas yang diberikan hanya sebatas dana.

Selanjutnya, faktor kecenderungan dukungan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Pariwisata ini cukup baik. Sikap dukungan dan komitmen masyarakat ini diketahui respon yang cepat apabila mengalami kendala kegiatan, serta kesediaan pengelola dan penerima baik waktu dan tenaga mereka yang ditujukan untuk memberikan kesuksesan terhadap program yang dilakukan di Desa Wisata Kemuning Lor. Terakhir, tataran struktur birokrasi pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata sudah sesuai yang diharapkan. Prosedur kerja yang digunakan

pelaksana juga sudah mencerminkan kesamaan apa yang diterapkan di Peraturan. Selain itu, tugas dan fungsi pelaksana juga sudah teratur jelas pada peraturan sehingga pelaksanaannya memungkinkan kerjasama pelaksana sudah mencerminkan kesesuaian dengan apa yang sudah ditetapkan dalam aturan yang ada.

Saran yang dapat peneliti berikan terkait pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata adalah perlu penambahan personil agar dapat memberikan pembantuan secara cepat kepada penerima yang jumlahnya relatif banyak. Sebagai program baru di Desa Wisata Kemuning Lor, diharapkan sosialisasi dilakukan kepada penerima secara intensif agar bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk lebih memahami program PNPM Mandiri Pariwisata. Diperlukan menggandeng pihak swasta sebagai mitra kerja dalam memajukan Desa Wisata Kemuning lor sekaligus sebagai promosi objek wisata yang ada di Desa Wisata Kemuning Lor kepada wisatawan baik lokal atau mancanegara, diperlukan pendampingan intensif bagi masyarakat di sekitar Desa Wisata khususnya Dinas kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta LSM dan perguruan tinggi agar mereka mendapatkan secara intensif mengenai pelatihan-pelatihan koperasi, peningkatan produksi, bimbingan teknik, terkait masalah modal, promosi dan pemasarannya.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektifitas Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember". Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang turut memberikan dukungan, arahan, dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Bapak Dr. Sutomo, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos. M.AP, selaku dosen

- pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan waktu, bimbingan, dukungan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
 8. Bapak Sirajuddin S.Par, SS selaku Tim Teknis PNPB Pariwisata, Bapak Junaidi, Bapak Juhaini dan masyarakat penerima program PNPB Pariwisata, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penelitian;
 9. Dede aa' yaitu Cucu Cahyati sebagai perempuan spesial. Terimakasih banyak yang memberikan semangat dan sabar untuk aa' hingga penelitian selesai dan memperoleh Gelar Sarjana;
 10. Teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2008 yang telah memberikan sumbangsinya selama penulisan ini, khususnya yaitu Mas Calvin Edo, Mbak Doris Alfiyah, Mbak Eka Putri Widhiyanti, dan teman yang lain khususnya Chandra, Navis, Arya, Amel

Daftar Pustaka

- [1] Slamet, *Dasar Pembangunan*, Jakarta: Elek Media-Gramedia (1981)
- [2] Rian Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo (2008)
- [3] Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo (2005) 102, 163.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta (2011)

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MkP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.
- [2] Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 06/KEP/D.PDP/IV/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Teknis Kabupaten atau Kota pada kegiatan peningkatan PNPB Mandiri Pariwisata.